

**PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PERAN PEMERINTAH DESA
DALAM PROSES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA
WIDODOMARTANI NGEMPLAK SLEMAN YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Sosiologi**

Disusun Oleh:

FEBRY NUR FAUZI

NIM. 11720009

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FEBRY NUR FAUZI

NIM : 11720009

Jurusan/Prodi : Sosiologi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah Desa Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *bodynote*, *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Agustus 2018



Penyusun

FEBRY NUR FAUZI
NIM: 11720009

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca, memeriksa, mengarahkan, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Febry Nur Fauzi

NIM : 11720009

Progam studi : Sosiologi

Judul : "Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah
Desa Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur di
Desa Widodomartani Ngemplak Sleman
Yogyakarta"

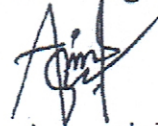
Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Sosiologi

Harapan saya, semoga saudara segera dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaosah

Demikian atas perhatiannya terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta 27 Agustus 2018



Astri Hanjarwati, MA

NIP. 19850502 201503 2 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. (0274) 519571 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DSH/PP.00.9/1040-A2018

Tugas Akhir dengan judul : PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PERAN PEMERINTAH DESA DALAM
PROSES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA WIDODOMARTANI
NGEMPLAK SLEMAN YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FEBRY NUR FAUZI
Nomor Induk Mahasiswa : 11720009
Telah diujikan pada : Senin, 27 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Astri Hanjarwati, S.Sos., M.A.
NIP. 19850502 201503 2 005

Penguji I

An. Kaprodi

Achmad Uzair, S.IP., M.A, Ph.D.
NIP. 19780315 201101 1 002

Penguji II

Dr. Yayan Suryana, M.Ag
NIP. 19701013 199803 1 008

Yogyakarta, 27 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

DEKAN



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

MOTTO

"Hari ini saya tidak mau merasa takut, tidak mau takut gagal, tidak mau takut berbahagia untuk menikmati yang indah, untuk mencintai, dan meyakini bahwa yang saya cintai juga mencintai saya."

(Sibyl F Patridge)

"Hari ini saya akan mengubah dunia dengan kekuatan berpikir positif, hidup harmonis dengan Tuhan, dan saya yakin hidup manusia dibentuk oleh pikiran manusia dan masa depan kehidupan tergantung oleh pikiran manusia dengan restu Tuhan."

(Wid. Mahardika) & Marcus Aurelius (Kaisar Romawi)

"Berusaha menjadi yang terbaik dan memberi yang terbaik dari diri kita untuk orang lain adalah "investasi" yang paling menguntungkan."

(Wid. Mahardika.)

"Saya tidak terlalu memikirkan masa depan yang mata saya tidak sampai melihatnya, tetapi apa yang saya kerjakan hari ini melampaui masa depan"

(Wid. Mahardika)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah Desa Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta”**. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh ummatnya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata I Program Studi Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang dalam kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Dr. Mochammad Sodik, SH, S.Sos., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Achmad Zainal Arifin, Ph.D, sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan juga sebagai Ketua Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Astri Hanjarwati, MA selaku pembimbing skripsi. Terimakasih atas bimbingan dan kesabaran dalam membina dan mengarahkan peneliti dalam memberikan masukan agar karya ini menjadi lebih baik.
4. Segenap Dosen Program Studi Sosiologi beserta jajaran staf Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga Allah SWT memberikan barakah atas kebaikan dan jasa-jasa mereka semua dengan rahmat dan kebaikan yang terbaik dari-Nya. Semoga skripsi ini menjadi manfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya. Amin

Yogyakarta, 23 Agustus 2018

Penyusun

FEBRY NUR FAUZI

ABSTRAK

Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah Desa Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta

FEBRY NUR FAUZI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dan peran pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta dan untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung partisipasi masyarakat dan peran pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subyek penelitian ini adalah masyarakat desa, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Widodomartani, dan Kepala Bagian Pembangunan Desa (BPD) Widodomartani Ngemplak Sleman. Hasil penelitian ini bahwa partisipasi dan peran masyarakat, pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak bahwa Pembangunan infrastruktur dari pemerintah desa yang ada pada perencanaan pembangunan Desa Widodomartani tahun 2018 adalah talut irigasi, cor blok, gorong-gorong, rumah-rumah tidak layak huni, gapura batas desa, pengerasan jalan atau pengaspalan jalan dan pembangunan infrastruktur yang lain. Dalam pembangunan infrastruktur Desa Widodomartani masyarakat dilibatkan melalui Musdes. Nanti di Musdes usulan-usulan masyarakat masuk di dalamnya. Setelah Musyawarah desa kemudian dilanjutkan dengan Musrenbangdes yang secara otomatis melibatkan masyarakat. Musdes ini merupakan usulan itu dari bawah yang melibatkan semua masyarakat, RT. Faktor penghambat partisipasi dan peran masyarakat, pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak adalah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Widodomartani adalah pembangunannya itu tidak tepat pada waktu seperti yang sudah ditentukan, warga yang majemuk, sangat banyak, dan dapat dikatakan semua warga menginginkan wilayahnya dibangun. Kendala lainnya yaitu peran pemerintahan desa dalam memberikan pengertian kepada warga yang sangat sulit, masyarakat tidak mengetahui prosedurnya atau masih awam. Kemudian ada juga kendala alam di Desa Widodomartani dan sekitarnya yang kadang-kadang tidak menentu. Sedangkan kendala yang di luar daerah yang jauh dari penduduk yang tidak mau kerja bakti (tidak mau berpartisipasi), misalnya kerja bakti jalan, tetapi di tengah sawah. Aspek kesiapan bahan bangunan atau akses untuk materialnya juga menjadi kendala, selain kendala pada masalah anggaran di atas (turunnya dana sudah mendekati akhir tahun).

Kata Kunci : Partisipasi, Peran, Masyarakat, Pemerintah Desa, Infrastruktur.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka teoritik.....	13
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Pembahasan.....	33
BAB II GAMBARAN UMUM OTASA DAN LOKASI	34
A. Diskripsi Wilayah Ngemplak	34
B. Kondisi Geologis dan Klimatologi Ngemplak	36
C. Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi	36
D. Demografi Desa Widodomartani.....	38
E. Profil Informan	42
BAB III PARTSIPASI MASYARAKAT DAN PERAN PEMERINTAH DESA WIDODOMARTANI.....	43

A. Dinamika Partisipasi Masyarakat	43
B. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	46
BAB IV PARTISIPASI DAN PERAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH	49
A. Partisipasi dan Peran dalam Proses Pembangunan	50
B. Faktor Penghambat dan Pendorong	66
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Persentase Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Ngemplak	34
Gambar 1.2 Peta Administratif Kecamatan Ngemplak.....	35
Gambar 1.3 Letak Desa Widodomartani.....	37



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Penduduk Berdasarkan Kelamin	38
Tabel 2.2. Penduduk Berdasarkan KTP	39
Tabel 2.3. Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	39
Tabel 2.4. Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	40
Tabel 2.5. Penduduk Berdasarkan Agama	41
Tabel 2.6. Profil Informan	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti diketahui bersama bahwa topik pembangunan di Indonesia masih menjadi topik yang masih sering diperbincangkan. Mulai topik ketidakmerataan pembangunan dari pusat ke daerah, hingga topik pembangunan desa yang melibatkan masyarakat sekitar. Konsep pembangunan yang sejatinya merupakan konsep yang sangat multidimensional, yang mengacu kepada serangkaian karakteristik dan segenap aspek kehidupan, baik aspek politik, ekonomi maupun sosial. Pembangunan merupakan proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan¹.

¹ Bryant, Coralie & White, Louis G. 1989. *Manajemen Pembangunan untuk*

Topik pembangunan menjadi menarik seiring dengan reformasi dan arus desentralisasi sejak Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, hingga Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Paradigma pembangunan nasional telah mengalami suatu perubahan yang signifikan, dari pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pembangunan masyarakat. Tetapi pada praktiknya pemerintah sendiri mengalami kesulitan dalam melakukan pembangunan infrastruktur desa, dimulai dari pembiayaan, juga terkadang penolakan terhadap pembangunan infrastruktur yang dirasa kurang bermanfaat oleh masyarakat. Oleh sebab itu proses pembangunan infrastruktur desa sendiri diperlukan proses partisipasi masyarakat dan juga peran pemerintah desa. Dimana dengan adanya pelibatan masyarakat dan juga peran pemerintah desa dalam pembangunan dapat menjawab permasalahan tersebut. Upaya untuk tercapainya keberhasilan

pembangunan masyarakat desa, maka segala program perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayahnya.

Pemerintah saat ini telah memberikan kewenangan yang dimiliki oleh desa dan kepala desa yang dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Pasal 22 ayat 1 dan Pasal 26 ayat 1 dan 2. saat ini desa telah dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan *bottom up*, dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat, dalam kondisi ini masyarakat desalah yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat, tujuannya adalah memberikan kemandirian atau

daya kepada masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri, pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Hal ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian masyarakat desa masih hidup di bawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan, sehingga membutuhkan pertolongan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut.

Proses pembangunan saat ini perlu memahami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari bawah (*grasroots*), memelihara keberagaman budaya, serta menjunjung tinggi martabat serta kebebasan bagi manusia. Pembangunan yang dilakukan harus memuat proses pemberdayaan masyarakat yang mengandung makna dinamis untuk mengembangkan dalam mencapai tujuan. Konsep yang sering dimunculkan dalam proses pemberdayaan adalah konsep kemandirian dimana program-program pembangunan dirancang secara sistematis agar individu maupun masyarakat menjadi subjek dari pembangunan. Kegagalan berbagai program pembangunan perdesaan di masa lalu adalah disebabkan antara lain karena penyusunan, pelaksanaan dan

evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat. Proses pembangunan lebih mengedepankan paradigma politik sentralistis dan dominannya peranan negara pada arus utama kehidupan bermasyarakat.

Pembangunan infrastruktur merupakan bentuk dari kepedulian pemerintah, wujud dari model pembangunan tersebut adalah Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP). Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum mencanangkan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan pengembangan infrastruktur permukiman di pedesaan melalui partisipasi masyarakat baik secara individu maupun kelompok sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.²

² Dahlan, dkk. 2012. Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. *Otoritas*. Vol.2(1) : hal 44

Idealnya pembangunan desa memiliki ikatan yang sangat kuat, baik karena kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Namun demikian, mengikutsertakan masyarakat untuk terlibat aktif dalam program-program pembangunan tidak semudah seperti yang dibayangkan. Partisipasi merupakan sebuah konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat. Keberhasilan pembangunan diperlukannya partisipasi awal dan nyata baik itu dimulai dari pemangku kepentingan dalam pembuatan rancangan kegiatan pembangunan, maupun masyarakat yang terlibat aktif dalam pembangunan tersebut.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesediaan seseorang atau masyarakat untuk berpartisipasi, adalah berkaitan dengan situasi saling ketergantungan, kepercayaan dan jaringan organisasi sosial yang memfasilitasi kerjasama untuk manfaat bersama. Oleh karena itu, dalam pembangunan infrastruktur desa harus lebih didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya keswadayaan/partisipasi masyarakat dalam proses

pelaksanaannya. Di sisi lain, infrastruktur yang dibangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir, dan di dalam pembangunan infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.³ Suatu pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan perdesaan, wajib diperlukan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari keikutsertaan perencanaan sampai pada hasil akhir dari pembangunan tersebut.

Infrastruktur perdesaan sebagai infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat

³ Ace Suryadi. 2005. *Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.: hal 61

pedesaan⁴. Pada umumnya pembangunan infrastruktur desa dilakukan secara bersama oleh masyarakat sekitar dan pemerintah desa. Dimana keikutsertaan dalam partisipasi pembangunan, didasarkan pada solidaritas masyarakat yang bersifat mekanis, serta lebih mementingkan kepentingan bersama. Sebagaimana yang menjadi perhatian Durkheim dalam bentuk solidaritas masyarakat yang ditulis oleh George Ritzer sebagai berikut:

Suatu masyarakat yang dicirikan oleh solidaritas mekanik bersatu karena semua orang adalah generalis. Ikatan diantara orang-orang itu ialah karena mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang mirip dan mempunyai tanggung jawab-tanggung jawab yang mirip.⁵

Pembangunan-pembangunan infratraktur sendiri dilakukan dengan melakukan musyawarah yang melibatkan kepala desa, sekretaris desa, Kepala Bagian Pembangunan Desa (BPD), kepala dusun (dukuh), serta perwakilan warga masyarakat.

⁴ A Asnudin. 2010. Pengendalian Sisa Material Konstruksi Pada Pembangunan Rumah Tinggal. *Mektek*. Vol.12(3): hal 76

⁵ George Ritzer. 2012. Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Post Modern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar: hal 145

Stone mengemukakan bahwa infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitas tujuan-tujuan ekonomi.⁶ Dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur, Effendi (2002:48) menyebutkan bahwa pentingnya pembangunan infrastruktur yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik saran pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar para investor mau menanamkan modalnya di daerah, apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk penanaman modal menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan tentunya

⁶ Robert J Kodoatie. 2005. *Pengaturan Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar: hal 101

akan lebih mahal dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif.⁷

Kurangnya peranan pemerintah terutama pemerintah Desa Widodomartani Ngemplak Sleman dalam memberdayakan masyarakat bidang pembangunan infrastruktur desa yaitu tidak berjalannya pemberdayaan masyarakat di desa tersebut yaitu tidak dilibatkannya masyarakat dalam pembangunan desa, dimana yang mengerjakan proyek pembangunan di desa tersebut adalah pemborong yang berasal dari daerah lain, dan hal ini diperoleh dari hasil pra-penelitian dengan melakukan wawancara terhadap beberapa warga dilokasi penelitian. Sikap pemerintah desa yang acuh dan tak acuh terhadap masyarakat dalam pembangunan desa akan mematikan tradisi gotong-royong masyarakat desa dan menjadikan masyarakat merasa tidak ikut memiliki dalam pembangunan yang dilakukan sehingga kemungkinan pembangunan tersebut akan cepat rusak karena tidak ada rasa memiliki dan tanggung

⁷ Bachtiar Effendi. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, Uhaiindo Media dan Offset

jawab masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan tersebut.

Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur masih terdapat masalah atau masih terdapat kendala atau faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang lemah atau masyarakat yang kurang respon. Keberhasilan pembangunan infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman sangat ditentukan oleh kerjasama, koordinasi dan sinergisitas yang solid dan saling menguatkan antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten (SKPD), DPRD, bahkan peran partisipatif pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, terutama dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), praktisi dan akademisi serta paraswastawan, kerjasama, koordinasi, sinergisitas, dan partisipasi masyarakat desa.

Berkaitan dengan penjelasan di atas, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah Desa Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dan peran pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta?
2. Bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung partisipasi masyarakat dan peran pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dan peran pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung partisipasi masyarakat dan peran pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus pada kajian partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur
- b. Manfaat praktis, Untuk melihat bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dan peran pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta.

- c. Manfaat metodologis, Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian selanjutnya yang relevan

D. Tinjauan Pustaka

Tema partisipasi pembangunan memang salah satu tema yang menarik untuk dijadikan kajian riset oleh para peneliti. Terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa, yaitu

Skripsi Karina tentang Analisis Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.⁸ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Pao, dengan melihat faktor pendukung dan faktor penghambat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan

⁸ Karina. “Analisis Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara“. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

pembangunan. Dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Pao dalam pembangunan infrastruktur jalan cukup baik, dan terdapat dua hal yang mempengaruhi. Pertama, adanya kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dengan membebaskan lahannya. Kedua, pembangunan infrastruktur jalan di Desa Pao dipengaruhi oleh faktor pendukung diantaranya yaitu sumbangan dan dukungan masyarakat serta faktor kesadaran atau kemauan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu adanya dana Desa dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Sedangkan objek dan tempat penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah masyarakat Padukukan Cawan-Pucangan, Desa Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Yang dimana secara budaya, kondisi sosial, serta kultur tentu memiliki perbedaan. Sementara penelitian yang saya lakukan, memiliki fokus penelitian yang berbeda yaitu partisipasi masyarakat dan peran pemerintah Desa Widodomartani.

Yang *kedua* Skripsi dari Sarah Nuramalia Putri tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bansari Kabupaten Temanggung).⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Jawa Tengah. Didalam penelitian Sarah Nuramalia Putri menggunakan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dengan cara survey, wawancara dan kuesioner. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik probability sampling yaitu proportionate stratified random sampling dengan menggunakan rumus slovin dan didapatkan sampel sebanyak 96 responden, selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Balesari Kecamatan Bansari

⁹ Sarah Nuramalia Putri, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bansari Kabupaten Temanggung)". Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. 2017

Kabupaten Temanggung dilihat dari keempat bentuk partisipasi yaitu partisipasi dalam bentuk pemberian ide/gagasan 60,25% atau berada pada kategori tinggi, partisipasi dalam bentuk sumbangan tenaga 80% atau berada dalam kategori sangat tinggi, sedangkan dalam bentuk sumbangan material 78,6% atau dalam kategori tinggi dan dalam bentuk sumbangan dana 72,2% atau dalam kategori tinggi. Skor partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Balesari tergolong tinggi dengan rata-rata skor 72,76%. Adapun yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Balesari adalah kesadaran/kemauan, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan penghasilan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh saya yaitu tempat penelitian dan proses pengumpulan data saat dilapangan. sehingga akan menghasilkan hasil yang berbeda.

Ketiga Skripsi Andi Ripai tentang Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bontomatene

Kabupaten Kepulauan Selayar¹⁰. Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Bontomatene masih tergolong sedang.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kec Bontomatene Kab

¹⁰ Andi Ripai Partisipasi dalam Pembangunan di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanudin Makasar. 2013

Kepulauan Selayar. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara survey, wawancara, observasi, kuesioner.

Hasil penelitian yang saya lakukan ini berbeda dari penelitian sebelumnya, secara garis besar penelitian yang saya lakukan berbeda tempat dan fokus penelitian yaitu bentuk partisipasi dan peran masyarakat dan pemerintah Desa Widodomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman. Penelitian ini akan mendukung penelitian yang sebelumnya, yaitu dimana pembangunan infrastruktur seharusnya meingutsertakan masyarakat sebagai perencana maupun pelaksana pembangunan itu sendiri. Sebab masyarakat sekitar lah yang tahu betul tentang permasalahan yang ada dan tindak penyelesaiannya.

E. Kerangka Teoritik

1. Partisipasi Masyarakat

Secara bahasa partisipasi berasal dari bahasa Inggris “*participation*” yang berarti mengambil bagian atau keikutsertaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa “partisipasi” adalah hal turut berperan serta dalam suatu

kegiatan, keikutsertaan, peran serta. Partisipasi dalam pembangunan sendiri secara umum yaitu peran serta masyarakat untuk ikut mengambil andil dalam proses pembangunan, baik itu bersifat fisik maupun non fisik. Partisipasi adalah keikutsertaan, perhatian dan sumbangan yang diberikan oleh kelompok yang berpartisipasi, dalam hal ini adalah masyarakat.¹¹ Partisipasi merupakan masukan dalam proses pembangunan dan sekaligus menjadi keluaran atau sasaran dari pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan partisipasi menurut I Nyoman Sumaryadi partisipasi adalah

“peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil –hasil pembangunan.”¹²

Partisipasi untuk menumbuhkan dan menggerakkan semangat partisipasi, diperlukan prasyarat yang dapat membangkitkan tenaga sosial dalam masyarakat.

¹¹ Pasaribu, C., & Simanjuntak. 2005. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Transito: hal 17

¹² I Nyoman Sumaryadi. 2010, *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia: hal 46

Partisipasi berdasarkan cara keterlibatannya dibagi menjadi dua, yaitu partisipasi langsung dan tidak langsung.

- a. Partisipasi langsung adalah keterlibatan seseorang, kelompok maupun masyarakat dalam berperan aktif, baik itu menyediakan tenaga pada proses pembangunan, maupun memberikan kontribusi pemikiran serta mengikuti saat pembuatan rancangan kegiatan pembangunan.
- b. Partisipasi tidak langsung sendiri merupakan partisipasi yang dimana seseorang mewakili hak partisipasinya kepada orang lain yang bisa mewakilinya dalam aktifitas partisipatif.

Partisipasi dalam pembangunan sendiri secara umum yaitu peran serta masyarakat untuk ikut mengambil andil dalam proses pembangunan, baik itu bersifat fisik maupun non fisik.

Ada beberapa macam dari bentuk-bentuk partisipasi: partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam pertemuan atau rapat. Kehadiran seseorang dalam

pertemuan akan mempengaruhi bagi masyarakat yang lain agar dapat ikut serta dalam memberikan sumbangsih pemikiran. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa pertolongan bagi orang lain. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dengan memberikan makanan atau minuman seadanya tanpa ada timbal balik (jasa).¹³ Dalam prosesnya partisipasi tertumpu pada interaksi-interaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi dalam konteks pembangunan desa mencakup keikutsertaan atau keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan, dan dalam penerapan program yaitu adanya pembagian keuntungan atau manfaat dari hasil pelaksanaan kegiatan serta keterlibatan warga dalam mengevaluasi kegiatan tersebut. Partisipasi dalam pembangunan dipandang

¹³Abu Huraerah, 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora: hal103

sebagai sebuah metodologi yang mengantarkan pelaku-pelakunya untuk dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi, sehingga dapat menganalisa dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi tersebut, sehingga memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.

2. Peranan (Role)

Dalam pengertian umum, peranan dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan merupakan suatu aspek yang dinamis dari suatu kedudukan (status). Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan seseorang.¹⁴ Peran

¹⁴ Sedarmayanti. 2007. *Perilaku Peranan*. Bandung, Jakarta: Gramedia Pustaka.:33

merupakan aspek dinamis dari kedudukan artinya, seseorang telah melaksanakan atau menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukan, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Peran sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, disamping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu. Sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.¹⁵ Sedang peran digunakan berkaitan dengan seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu seseorang diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peranan merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan atau status.¹⁶ Selain itu, peranan atau *role* juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

“1) Peranan nyata (*anacted role*) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan. 2) Peranan yang dianjurkan (*prescribed role*) adalah cara yang

¹⁵ Suyanto Bagong & Dwi Narwoko.2014, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan Edisi Ketiga*. Jakarta: Kencana,; 158-159

¹⁶ Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Yogyakarta:Raja Grafindo Persada.: 268.

diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu. 3) Konflik peranan (*role conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain. 4) Kesenjangan peranan (*role distance*) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional. 5) Kegagalan peran (*role failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu. 6) Model peranan (*role model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti. 7) Rangkaian atau lingkup peranan (*role set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya. 8) Ketegangan peranan (*role strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.”¹⁷

Dalam hal ini tentunya pemerintah desa memiliki peran atau andil bagaimana mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi melibatkan diri dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada. Partisipasi dan peran sendiri merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Upaya untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa, maka segala program perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan

¹⁷ Bruce J. Cohen. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.:25

dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayahnya. Sejalan dengan tema yang penyusun ambil yakni "Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah Desa Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta".

Menurut Soekanto peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status).¹⁸ Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.

Menurut Wirutomo bahwa peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang

¹⁸ Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Yogyakarta:Raja Grafindo Persada.:243

dipegangnya.¹⁹ Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan. Pendapat lain Alvin L. Bertran yang diterjemahkan oleh Taneko bahwa peranan adalah pola tingkah

¹⁹ David Berry. 2003. *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada:hal 101

laku yang diharapkan dari orang yang memegang status atau kedudukan tertentu.²⁰

Berdasarkan pengertian di atas, peranan dapat diartikan sebagai suatu perilaku atau tingkah laku seseorang yang meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi dalam masyarakat. Pendapat lain dalam buku sosiologi suatu pengantar bahwa peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.²¹ Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau mengaku suatu posisi dalam sistem sosial.

3. Pemerintah Desa

Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar komunitas saling mengenal dengan baik dengan corak

²⁰ Soleman B Taneko. 1986. *Konsepsi Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Fajar Agung: hal 220

²¹ Bruce Cohen. J. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta: hal 76

kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah²².

Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pembangunan nasional, desa memegang peranan yang sangat penting, sebab desa merupakan struktur pemerintahan terendah dari sistem pemerintahan Indonesia. Setiap jenis kebijakan pembangunan nasional pasti bermuara pada pembangunan desa sebab pembangunan Indonesia tidak akan ada artinya tanpa membangun desa, dan bisa dikatakan bahwa hari depan Indonesia terletak dan tergantung dari berhasilnya membangun desa. Sehingga dengan semangat desentralisasi dalam otonomi daerah ini masyarakat haruslah dilibatkan

²² Dadang Juliantara. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.:18

atau diberdayakan dalam pembangunan desanya. Sebab disadari atau tidak bahwa pembangunan desa telah banyak dilakukan sejak dari dahulu hingga sekarang, tetapi secara umum hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk badan permusyawaratan desa sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan dan menjadi jembatan antara pemerintah desa dan warga masyarakat desa., yang berfungsi sebagai berikut:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.²³

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa atau yang disebut juga dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa

²³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 55

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa berwarga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

4. Pembangunan Infrastruktur

Katz menjelaskan Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga.²⁴ Disamping itu pembangunan juga merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan

²⁴ Moeljarto T .Tjokrowinoto. 1995. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.:62

lembagalembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut.²⁵ Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahanperubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Pemerintah dalam mengartikan pembangunan desa adalah pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna Pendekatan pembangunan yang sangat populer pada saat ini adalah pendekatan pembangunan yang mengutamakan peningkatan keberdayaan manusia masyarakat yang disebut pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Pembangunan adalah proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional untuk memobilisasi dan mengelola sumberdaya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam

²⁵ Michael P Todaro, & Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.:79

kualitas hidup sesuai dengan aspirasinya sendiri.²⁶ Definisi ini menekankan pada proses pembangunan dan fokus utamanya adalah pemberdayaan. Definisi ini mencakup asas keadilan, berkelanjutan, dan pemerataan. Oleh karena itu, harus diakui bahwa masyarakat sendirilah yang menentukan apa yang sebenarnya yang dianggap perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasa kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang sedang dihadapi. Pembangunan desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat,

²⁶ David C Korten. 2002. *Pembangunan yang Memihak Rakyat: Kupasan tentang Teori dan Metode Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Studi Pembangunan:110

sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Suatu pembangunan infrastruktur akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan infrastruktur tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, maka yang diperlukan adalah pemberdayaan masyarakat didalam pembangunan tersebut, mulai dari penyusunan rencana sampai pada proyek pembangunan tersebut selesai. Jadi pembangunan perlu menjadikan pemberdayaan menjadi nilai dan pilihan kebijakan, sekaligus sebagai pembelajaran sosial, dalam arti selalu belajar bagaimana melakukan pemberdayaan yang semakin hari semakin baik. Karena seperti kata cendekiawan Soedjatmoko, bahwa pembangunan tidak lain adalah belajar untuk hidup lebih baik daripada kemarin.²⁷ Pembelajaran adalah bagian inti dari pembangunan pada zaman kini, dan mungkin sampai pada kurun waktu yang panjang di masa depan.

²⁷ Nurlela Ketaren. 2009. *Administrasi Pembangunan*. Medan: hal 187

Untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di desa tersebut, maka diperlukan adanya kemampuan dari perangkat pemerintahan desa. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan merencanakan, kemampuan melaksanakan dan kemampuan memotivasi. Dari setiap kemampuan tersebut diharapkan bahwa perangkat pemerintahan desa dapat mengatasi dan memecahkan segala persoalan yang berkaitan erat dengan pembangunan desa. Namun di sisi lain kemampuan perangkat pemerintahan desa harus didukung dari peran serta masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa. Diharapkan dengan adanya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang dibuat. Pada dasarnya pembangunan desa merupakan pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Semakin tinggi peran serta masyarakat tersebut, maka semakin cepat pula pembangunan desanya dapat terealisasi.

Pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan individu untuk mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama definisi tersebut yaitu:

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan maksimal manusia, baik individu maupun kelompok (*capacity*).
- b. Pembangunan mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*).
- c. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan (*empowerment*).
- d. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri dan berkelanjutan (*sustainability*).
- e. Pembangunan sendiri akan mengurangi ketergantungan negara yang satu terhadap negara yang lainnya dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (*interdependence*).²⁸

Dalam rangka untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakatnya perlu menciptakan suatu strategi pencapaian tujuan tersebut. Dalam merancang strategi yang dimaksud, pemerintah desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

²⁸ Taliziduhu Ndruha. 1990. *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan di Beberapa Desa*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma: hal 16

- a. Keterpaduan pembangunan desa, dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain.
- b. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemanfaatan.
- c. Keberpihakan, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kepada seluruh masyarakat desa.
- d. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasilnya.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 88 (1), disebutkan bahwa Pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga wajib mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan

perdesaan wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan diatur dengan Perda dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepentingan masyarakat desa.
- b. Kewenangan desa.
- c. Kelancaran pelaksanaan investasi.
- d. Kelestarian lingkungan hidup.
- e. Keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

Agar pembangunan di desa dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat, maka harus diterapkan prinsip-prinsip pembangunan, sasaran pembangunan dan ruang lingkup pengembangannya. Berikut penjelasan mengenai ketiga unsur tersebut menurut Adisasmita:

- a. Prinsip-prinsip pembangunan pedesaan, yaitu pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip berikut ini:
 - 1) Transparansi (keterbukaan)
 - 2) Partisipatif.
 - 3) Dapat dinikmati masyarakat.
 - 4) Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan.

- 5) Berkelanjutan (*sustainable*).
- b. Sasaran pembangunan pedesaan, adalah untuk terciptanya:
- 1) Peningkatan produksi dan produktifitas.
 - 2) Percepatan pertumbuhan desa.
 - 3) Peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif.
 - 4) Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat, dan.
 - 5) Perkuatan kelembagaan.
- c. Ruang lingkup pengembangan

Pengembangan pedesaan mempunyai ruang lingkup, yakni:

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan pemukiman dan lainnya).
- 2) Pemberdayaan masyarakat.
- 3) Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Dan Sumbe Daya Manusia (SDM).
- 4) Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin), dan.
- 5) Penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (*inter rural-urban relationship*)²⁹

Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Perda

²⁹ Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu: hal 18-20

sebagaimana dimaksud wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan adat-istiadat desa. Pembangunan sebagai peningkatan kemampuan untuk mengendalikan masa depan, mengandung beberapa implikasi. Pertama, kemampuan (*capacity*), tanpa kemampuan seseorang tidak akan dapat mempengaruhi masa depannya. Kemampuan di sini meliputi, fisik, mental, dan spritual. Segi-segi tersebut haruslah mengalami perubahan. Kedua, kebersamaan (*equity*) atau keadilan sosial. Pembangunan berarti juga pemerataan, bagaimanapun tingginya laju pertumbuhan suatu negara, jika kemajuan tidak merata, hal itu sia-sia belaka. Ketiga, kekuasaan (*empowerment*), hal ini berarti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk secara bebas memilih berbagai alternatif sesuai dengan tingkat kesadaran, kemampuan, dan keinginannya, dan memberinya kesempatan untuk belajar, baik dari keberhasilan maupun dari kegagalannya dalam memberi respon terhadap perubahan. Keempat, ketahanan dan kemandirian (*sustainability*), implikasi ini mengandung arti yang luas karena faktor-faktor pembangunan terbatas adanya, sementara tuntutan kebutuhan semakin

meningkat, maka sumber-sumber yang ada harus dapat dikelola sedemikian rupa sehingga pada suatu saat masyarakat yang bersangkutan mampu berkembang secara mandiri.³⁰

F. Metode Penelitian

Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan pada saat melaksanakan penelitian di lapangan berupa rekaman wawancara. Pengumpulan data didefinisikan sebagai suatu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode-metode tertentu, data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat-kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.³¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yakni pengamatan dan penyelidikan secara kritis untuk mendapatkan keterangan yang tepat terhadap suatu persoalan dan obyek tertentu di daerah kelompok komunitas

³⁰ Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan di Beberapa Desa*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma: hal 35

³¹ Bungin, Burhan, 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana: Hal 103.

atau lokasi tertentu akan ditelaah atau menggambarkan atau uraian atas sesuatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti.³²

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Widodomartani, Pemerintah Desa Widodomartani Ngemplak Sleman yang terdiri dari; Kepala Desa dan Sekretaris Desa Widodomartani, dan Kepala Bagian Pembangunan Desa (BPD) Widodomartani Ngemplak Sleman.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah masyarakat desa dan pemerintah Desa Widodomartani Ngemplak Sleman.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman.

5. Teknik Pengumpulan Data

³² Rosady Ruslan. 2013. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada: hal 55

Dalam setiap penelitian, di samping menggunakan metode yang tepat diperlukan pula kemampuan memilih dan bahkan juga menyusun teknik pengumpulan data yang relevan. Kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik pengumpulan data ini akan sangat mempengaruhi objektivitas hasil penelitian³³. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi pustaka.

a. Wawancara (*Interview*)

Peneliti melakukan wawancara terstruktur terhadap responden yang merupakan sumber data primer yang terkait dengan penelitian ini, yaitu; masyarakat desa, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Widodomartani, dan Kepala Bagian Pembangunan Desa (BPD) Widodomartani Ngemplak Sleman terkait dengan peran pemerintah desa dalam

³³ Hadiri Nawawi. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Wali Pers: hal 100

pembangunan infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman.

b. Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung ke Desa Widodomartani dan melihat secara langsung bagaimana partisipasi warga dan peran desa di sana dan berkomunikasi secara tatap muka sehingga diperoleh data yang akurat.

c. Dokumentasi

menjelaskan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.³⁴ Dokumen bisa berbentuk tulisan dan gambar. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan

³⁴ Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.: hal 329

meminta data-data dari pihak Desa Widodomartani untuk mendukung Penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Teknik analisa data dapat dilakukan dengan model analisis deskriptif kualitatif di mana intinya adalah interaksi antar komponen penelitian maupun proses pengumpulan data selama proses penelitian.³⁵ Analisa data dilakukan untuk menganalisis bagaimanakah partisipasi masyarakat dan peran pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman. Analisis pada data kualitatif yang dilakukan meliputi.

a. Keabsahan Data (Triangulasi)

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain.³⁶ Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, dimana

³⁵ Ibid: hal 67

³⁶ Lexy J Moleong. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya: hal 330

peneliti membandingkan dan mengoreksi ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.³⁷ Hal itu dicapai dengan jalan membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.

b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan proses pemilihan, pemusatan, atau penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang mengacu dari catatan lapangan, reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu,

³⁷ Ibid, hal 331

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan upaya penyusunan, pengumpulan informasi kedalam suatu matriks atau konfigurasi yang mudah dipahami. Konfigurasi semacam ini akan memudahkan dalam penarikan kesimpulan atau penyederhanaan informasi yang kompleks kedalam suatu bentuk yang dapat dipahami.

Penyajian data yang sederhana dan mudah dipahami adalah cara utama untuk menganalisis data deskriptif kualitatif yang valid.

d. Menarik Kesimpulan

Berawal dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari makna dari data-data yang terkumpul. Selanjutnya peneliti mencari arti dan penjelasannya kemudian

menyusun pola-pola hubungan tertentu ke dalam suatu kesatuan yang mudah dipahami dan ditafsirkan.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam penelitian yang dilakukan ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I, pada bab ini terdiri dari pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Rangkaian tersebut digunakan untuk membantu peneliti dalam penelitian.

Bab II, pada bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian yang akan dilakukan, dan profil informan. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di wilayah Desa Widodomartani, Sleman, Yogyakarta.

Bab III, pada bab ini menjelaskan bagaimana proses berjalannya partisipasi warga dan Peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur

Bab IV pada bab ini adalah analisis mengenai bagaimana partisipasi masyarakat dan peran pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur di Desa Widodomartani.

Bab V pada bab ini adalah penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil akhir penelitian yang akan dilakukan.

BAB V

PENUTUP

Setelah mengadakan pengamatan langsung membahas dan menganalisis hasil penelitian, maka dalam bab ini penyusun memberikan kesimpulan sesuai dengan kajian tentang partisipasi masyarakat dan peran pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta.

A. Kesimpulan

1. Partisipasi dan peran masyarakat, pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak bahwa Pembangunan infastruktur dari pemerintah desa yang ada pada perencanaan pembangunan Desa Widodomartani tahun 2018 adalah talut irigasi, cor blok, gorong-gorong, rumah-rumah tidak layak huni, gapura batas desa, pengerasan jalan atau pengaspalan jalan dan pembangunan infastruktur yang lain. Dalam pembangunan infastruktur Desa Widodomartani masyarakat dilibatkan

melalui Musdes. Nanti di Musdes usulan-usulan masyarakat masuk di dalamnya. Setelah Musyawarah desa kemudian dilanjutkan dengan Musrenbangdes yang secara otomatis melibatkan masyarakat. Musdes ini merupakan usulan itu dari bawah yang melibatkan semua masyarakat, RT.

2. Faktor penghambat partisipasi dan peran masyarakat, pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak adalah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Widodomartani adalah pembangunannya itu tidak tepat pada waktu seperti yang sudah ditentukan, warga yang majemuk, sangat banyak, dan dapat dikatakan semua warga menginginkan wilayahnya dibangun. Kendala lainnya yaitu peran pemerintahan desa dalam memberikan pengertian kepada warga yang sangat sulit, masyarakat tidak mengetahui prosedurnya atau masih awam. Kemudian ada juga kendala alam di Desa Widodomartani dan sekitarnya yang kadang-kadang tidak menentu. Sedangkan kendala yang di luar daerah yang jauh dari penduduk yang tidak mau kerja bakti tidak mau berpartisipasi, misalnya kerja bakti jalan, tetapi di tengah sawah. Aspek kesiapan bahan

bangunan atau akses untuk materialnya juga menjadi kendala, selain kendala pada masalah anggaran di atas (turunnya dana sudah mendekati akhir tahun).

B. Saran-saran

Setelah memberikan kesimpulan atas hasil kajian pada urain di atas, maka dibagian akhir penyusun mencoba memberikan saran kepada semua pihak yang berkepentingan pada mengenai partisipasi masyarakat dan peran pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak.

1. Pemerintah Desa Widodomartani Ngemplak dapat mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dengan cara membantu dalam bentuk mempercepat mendorong pemerintah kabupaten untuk mempercepat realisasi anggaran yang lebih cepat.
2. Pemerintah Desa Widodomartani Ngemplak perlu memberikan bantuan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Desa Widodomartani Ngemplak.
3. Warga masyarakat Desa Widodomartani Ngemplak perlu lebih mendukung (berpartisipasi) dalam pembangunan infrastruktur

di Desa Widodomartani Ngemplak dengan lebih antusias dan lebih partisipasif dalam keterlibatan menjalankan pembangunan infrastruktur desa demi kesejahteraan warga masyarakat Desa Widodomartani Ngemplak.



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asnudin, A. 2010. Pengendalian Sisa Material Konstruksi Pada Pembangunan Rumah Tinggal. *Mektek*. Vol.12(3).
- Berry, David. 2003. *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- BPS. 2016. *Kecamatan Ngemplak Dalam Angka*. Yogyakarta: BPS Sleman.
- Bryant & White LG. 1989. *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- Cohen, Bruce. J. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dahlan, Indrasto Wahyudi, Anwar Parawangi, & Amir Muhiddin. 2012. Peranan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Desa Sendana Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa. *Otoritas*. Vol.2(1).
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, Uhaindo Media dan Offset.

George Ritzer. 2012. *Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Post Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Juliantara, Dadang. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.

Ketaren, Nurlela. 2009. *Administrasi Pembangunan*. Medan.

Kodoatie, Robert J. 2005. *Pengaturan Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Korten, David C. 2002. *Pembangunan yang Memihak Rakyat: Kupasan tentang Teori dan Metode Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Studi Pembangunan.

Koentjaraningrat. 2002. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.

Moleong, Lexy. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadiri. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Wali Pers.

Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan di Beberapa Desa*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma.

Pasaribu, C., & Simanjuntak. 2005. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Transito.

Putnam R. 1993. The Prosperous Community; Sosial Capital and Public Life. *The American Prospect*. Vol.13:65-78,

Rosalina, Maya. 2013. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *eJournal Pemerintahan Integratif*. Vol.1(1):106-120.

Ruslan, Rosady. 2013. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sedarmayanti. 2007. *Perilaku Peranan*. Bandung. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sumaryadi, I. Nyoman. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Suryadi, Ace. 2005. *Pendidikan, Investasi SDM, dan Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.

Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.

Tjokrowinoto, Moeljarto T. 1995. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Todaro, Michael P., & Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Taneko, Soleman. B. 1986. *Konsepsi Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Fajar Agung.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005.

Sumber Skripsi

Karina. “Analisis Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pao Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara“. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makasar, 2017

Sarah Nuramalia Putri, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bansari Kabupaten Temanggung)”. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. 2017

Andi Ripai Partisipasi dalam Pembangunan di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanudin Makasar. 2013

Sumber internet

<http://wikimapia.org/#lang=en&lat=7.701465&lon=110.451919&z=18>

&m=b&search=cawan, Diakses pada tanggal 12 Agustus 2018.

